

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(PERUBAHAN RENJA) PERANGKAT DAERAH
KOTA PASURUAN TAHUN 2022**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, maka Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 dapat disusun. Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan “Pasuruan Menuju MTQ XXX” dimana Kota Pasuruan menjadi tuan rumah dari pelaksanaan program kegiatan tersebut.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022, disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 2022, dengan penyempurnaan sesuai ‘Titik Nol’ Rencana Kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih, serta dengan maksud sebagai referensi dan acuan Dinas dalam melaksanakan Visi Pemerintah Daerah Kota Pasuruan tahun 2021-2024, yaitu :

“ MENJADIKAN KOTA PASURUAN MAJU, INDAH, DAN HARMONIS ” dalam arti :
“ Maju ekonominya, indah kotanya dan harmoni warganya ” atau dengan Slogan :
Pasuruan Kota “ MADINAH ”

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) 2022, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya sehingga dapat terselesainya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 25 Juli 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN



Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP :19651231 198602 1 041

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan *event/kegiatan* MTQ ke-30 Jawa Timur tahun 2023, dimana Kota Pasuruan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaannya. *Event* ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengoptimalan promosi dari berbagai bidang melalui *event* untuk meningkatkan PAD sekaligus memulihkan kekuatan perekonomian masyarakat pasca pandemi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan disini juga turut mendukung pelaksanaan MTQ ke-30, salah satunya dengan berpartisipasi dalam rangkaian acara melalui *event* “Pasuruan Jatim Pride”. Sebuah kegiatan yang menampilkan karnaval atau /pawai/arak-arakan dalam bentuk mobil hias, atraksi, musik, tari-tarian, *fashion costume* yang mencerminkan identitas khas daerah dari masing-masing Kab/Kota Se Jawa Timur.

Event tersebut diharapkan mampu memulihkan perekonomian, seperti hotel, penginapan, rumah makan, restaurant, *café*, tempat oleh-oleh, tempat parkir yang nantinya akan ramai dengan pengunjung.

Selain *event* tersebut, juga mendukung Program Walikota “Pasuruan Resik” dengan melakukan Rehab Kamar Mandi dan Renovasi Ruang Rapat, Perencanaan Teknis & Pengawasan, serta Pengadaan Korden. Maka dari itu dilakukannya Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) perlu disusun untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruantahun 2022 merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan

urusan perindustrian dan perdagangan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Isi Perubahan Renja adalah menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada satu tahun ke depan.

Proses penyusunan Perubahan Renja 2022 OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Perubahan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perubahan OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022 merupakan pelaksanaan awal tahun rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026. Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Misi Walikota terpilih pada tahun 2021. Selanjutnya dari rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 setiap tahun disusun Rencana Kerja Perubahan yang selanjutnya disebut Perubahan Renja. Perubahan Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, penjelasan mengenai tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD, karena Perubahan Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra).

Keterkaitan Perubahan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena didalam Perubahan Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD,

Renstra OPD dan RKPD. Perubahan Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPP, RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanguana jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
29. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2019 tentang pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 16 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011–2031;
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 - 2026;
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
36. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
37. Perwali tentang P RKP Nomor 63 Tahun 2022 Tanggal 22 Juli 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) OPD adalah:

1. Menjadi pedoman bagi OPD dalam melaksanakan Program/Kegiatan selama 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD adalah :

1. Tersedianya acuan bagi OPD dalam melaksanakan Program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.
2. Terwujudnya pedoman untuk evaluasi program/kegiatan selama satu tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIBULAN II TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Tribulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIBULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Tribulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) OPD merupakan Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian target antara lain adalah kecukupan anggaran, sedangkan skedul harus sesuai dengan

SIMDA, serta faktor jangka waktu dalam pengadaan barang/jasa, dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan, adanya beberapa faktor tersebut menyebabkan kurang maksimalnya target yang telah direncanakan.

Untuk mencapai target tahun yang akan datang diperlukan kebijakan melalui langkah-langkah yang antara lain, kecukupan anggaran untuk semua program kegiatan, agar program/kegiatan bisa terlaksana dengan baik bila didukung perencanaan, sumber daya manusia, dan sarana - prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup. Program/kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, urusan ini diselenggarakan melalui 7 program, 15 kegiatan dan 31 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.28.922.832.300,- dan sampai dengan Tribulan II tahun 2022, realisasi keuangan telah mencapai Rp.4.286.316.306,-

Rekapitulasi capaian kinerja terhadap RPJMD pada setiap program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tribulan II Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 48% dan serapan anggaran 11%
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan capaian kinerja 0% dan serapan anggaran 0%
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan capaian kinerja 28% dan serapan anggaran 4%
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan capaian kinerja 110% dan serapan anggaran 22%

5. Program Pengembangan Ekspor dengan capaian kinerja 100% dan serapan anggaran 7%
6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan capaian kinerja 19% dan serapan anggaran 1%
7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan capaian kinerja 97% dan serapan anggaran 7%

Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan terhadap target RPJMD, telah mencapai kinerja outcome sebesar 57% dengan realisasi keuangan sebesar 7%.

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, urusan ini diselenggarakan melalui 1 program, 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.15.753.452.971,- dan sampai dengan Tribulan II tahun 2022, realisasi keuangan telah mencapai Rp.342.350.516,-

Rekapitulasi capaian kinerja terhadap RPJMD pada setiap program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tribulan II Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan capaian kinerja 0% dan serapan anggaran 12%

Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja program pada Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian terhadap target RPJMD, telah mencapai kinerja outcome sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar 12%

Capaian kinerja masih 0% dikarenakan kegiatan baru akan dilaksanakan pada Tribulan III. Selanjutnya, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu dengan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di Tribulan III.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d TB II	Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10	11 = (10 / 4)				
Tahun 2021														
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi (%)			98%	76%	78%			
3	30	01	2	01	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu			98%	98%	100%			
3	30	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang disusun		2	0	0%			
						Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun			4	3	75%			

							Jumlah persentase usulan stakeholder yang masuk dalam dokumen perencanaan OPD			30%	30%	100%							
3	30	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun			4	4	100%							
3	30	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP dan LKJIP yang disusun			2	0	0%							
							Jumlah event yang diikuti			2	0	0%							
3	30	01	2	02		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan keuangan yang tersusun tepat waktu			98%	98%	100%							
3	30	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji & tunjangannya			14	12	86%							
3	30	01	2	02	05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur			95	95	100%							
							Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			1		0%							
							Jumlah peserta sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai usaha			232		0%							
3	30	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun			4	4	100%							

3	30	01	2	03		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu			98%	98%	100%			
3	30	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun			4	1	25%			
3	30	01	2	05		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya			98%	98%	100%			
3	30	01	2	05	11	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek			95	95	100%			
3	30	01	2	06		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran			98%	98%	100%			
3	30	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia			11	10	91%			
3	30	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia			45	27	60%			
3	30	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah air minum isi yang tersedia			120	0	0%			
							Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia			875	830	95%			
							Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia			180	25	14%			

3	30	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			80	34	43%			
							Jumlah Rapat Koordinasi Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS			5	0	0%			
3	30	01	2	07		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah			98%	98%	100%			
3	30	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah belanja modal pengadaan dispenser			1	0	0%			
							Jumlah belanja modal pengadaan meja kerja			1	1	100%			
							Jumlah belanja pengadaan fillinf cabinet yang tersedia			2		0%			
							Jumlah belanja modal pengadaan kursi lipat			12		0%			
							Jumlah belanja modal pengaadaan laptop			2		0%			
3	30	01	2	08		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran			98%	98%	100%			
3	30	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia			260	74	28%			
3	30	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi			12	12	100%			

3	30	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung perkantoran yang tersedia			41	41	100%		
							Jumlah jenis kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia			33	33	100%		
							Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia			49	49	100%		
3	30	01	2	09		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang terpelihara			98%	98%	100%		
3	30	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2			11	11	100%		
							Jumlah belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4			2	2	100%		
3	30	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Belanja Jasa KIR Kendaraan Dinas			2	0	0%		
							Jumlah Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)			30	18	60%		
3	30	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Belanja Pemeliharaan AC			25	19	76%		

						Jumlah Belanja Pemeliharaan Komputer			40	0	0%			
						Jumlah Belanja Pemeliharaan Printer			21	0	0%			
3	30	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Belanja Pemeliharaan Gudang Belakang		12	12	100%			
						Jumlah Belanja Pemeliharaan Ruang Retribusi			6	0	0%			
3	30	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luasan taman, halaman, tempat parkir dan pagar yang dipelihara		2000	2000	100%			
3	30					URUSAN PERDAGANGAN								
3	30	2				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen		80%	100%	125%			
						Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebelan Bahan Berbahaya di Tingkat di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pedagang/Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen		40	50	125%			
						Sub Kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen		50	50	100%			

3	30	3				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Ketercapaian Retribusi Pasar			100%	101,20%	101%		
3	30	3	2	01		Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi			33,33%	33,33%	100%		
3	30	3	2	01	1	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Mall Poncol			1	1	100%		
3	30	3	2	01	2	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Luasan Revitalisasi			290	290	100%		
							Jumlah Pasar Yang Dikelola			6	6	100%		
3	30	3	2	02		Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase PKL yang dibina			6%	4,77%	80%		
3	30	3	2	02	01	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima			1463	70	5%		
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata - rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok			10%	8,03%	80%		
3	30	04	2	02		Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Bahan Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10%			10%	6,00%	60%		

3	30	04	2	02	02	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Ketersediaan Kebutuhan Penting Lainnya			264	264	100%			
3	30	04	2	02	03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Pokok Murah yang Disediakan			1500	1500	100%			
3	30	05				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan IKM yang Melakukan Ekspor			0,5%	5,2%	1040%			
3	30	05	2	01		Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Melakukan Ekspor			0,40%	0,60%	150%			
3	30	05	2	01	02	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional	Jumlah promosi produk unggulan skala nasional dan regional yang difasilitasi			3	0	0%			
							Jumlah even pameran			1	0	0%			
							Jumlah hibah Kadin								
3	30	06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase capaian standardisasi dan perlindungan konsumen			7,7%	7,7%	100%			

3	30	06	01			Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase capaian standardisasi dan perlindungan konsumen			7,7%	7,7%	100%			
3	30	06	01	01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera dan Tera Ulang	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan ditera ulang			550	7700	1400%			
3	30	06	01	02		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah peserta pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal			80	80	100%			
3	30	07				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran			30%	45,6%	152%			
3	30	07	2	01		Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Persentase IKM yang dipromosikan								
3	30	07	2	01	01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah even festival pesisir			4	0	0%			
3	30	07	2	01	03	Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem dan Jaringan Perdagangan	Jumlah aplikasi yang dibangun			1	1	100%			
3	31					URUSAN PERINDUSTRIAN									
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan IKM berkembang			5%	7,10%	142%			
3	31	02	2	01		Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah			30%	30,61%	102%			

3	31	02	2	01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Pasuruan			1	0	0%			
3	31	02	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dukungan Kegiatan Dekranasda Kota Pasuruan			5	5	100%			
							Jumlah Peserta Fasilitasi Pengemasan dan Sertifikasi Produk IKM			14	14	100%			
							Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Kerja			10	0	0%			
							Jumlah Peserta Pengembangan Produk Konveksi			10	0	0%			
							Jumlah Peserta Pengembangan Produk Logam			10	10	100%			
							Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan Manajemen IKM			25	25	100%			
							Jumlah Sampel Rokok yang diuji			2	0	0%			
3	31	02	2	01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan			5	2	40%			
3	31	02	2	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelayanan UPTD Logam yang Diselenggarakan			240	178	74%			

3	30	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	20						4	0	10%
3	30	01	2	03		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	98%						98%	50%	51%
3	30	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	20						4	2	8%
3	30	01	2	05		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	98%						98%	0%	0%
3	30	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5						1	2	40%
							Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur	475						95	100	21%
3	30	01	2	06		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	98%						98%	50%	51%
3	30	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	55						11	7	13%
3	30	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	225						45	6	3%

3	30	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah air minum isi ulang yang tersedia	600					120	0	0%
							Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	4375					875	300	7%
							Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	900					180	125	14%
3	30	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	400					80	65	16%
							Jumlah Rapat Koordinasi Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS	25					5	1	4%
3	30	01	2	07		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	90%					98%	50%	56%
3	30	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah belanja modal pengadaan alat pendingin	30					6	0	0%
							Jumlah belanja modal pengadaan komputer	40					8	0	0%
3	30	01	2	08		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	98%					98%	50%	51%
3	30	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1300					260	100	8%

3	30	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	60						12	6	10%
3	30	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	245						49	55	22%
							Jumlah jenis kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	165						33	27	16%
							Jumlah tenaga pendukung perkantoran yang tersedia	190						38	38	40%
3	30	01	2	09		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang terpelihara	98%						98%	50%	51%
3	30	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	55						11	10	36%
							Jumlah belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	15						3	3	40%
3	30	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Belanja Jasa KIR Kendaraan Dinas	10						2	0	0%
							Jumlah Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	105						21	2	2%

3	30	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor	20					4	2	10%
3	30	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luasan taman, halaman, tempat parkir dan pagar yang dipelihara	1000					200	0	0%
3	30					URUSAN PERDAGANGAN									
3	30	2				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	80%					80%	0%	0%
3	30	2	2	06		Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pedagang/Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen	375					75	0	0%
3	30	2	2	06	3	Sub Kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen	375					75	0	0%
3	30	3				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Ketercapaian Retribusi Pasar	100%					100%	28%	28%
3	30	3	2	01		Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi	33,33%					33,33%	0%	0%
3	30	3	2	01	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat	15					3	0	0%

3	30	3	2	01	02	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang Dikelola	30					6	6	20%
3	30	3	2	02		Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase PKL yang dibina	6%					6%	0%	0%
3	30	3	2	02	01	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima	425					85	85	20%
3	30	3	2	02	02	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Petugas Pasar	715					143	143	40%
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata - rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok	10%					10%	9%	110%
3	30	04	2	02		Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10%	20%					20%	9%	9%
3	30	04	2	02	02	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Ketersediaan Kebutuhan Penting Lainnya	1320					264	132	10%
3	30	04	2	02	03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Pokok Murah yang Disediakan	9325					1865	1865	20%

3	30	05				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan IKM yang Melakukan Ekspor	0,5%						50	9	100%
3	30	05	2	01		Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Melakukan Ekspor	0,4%						20	1	150%
3	30	05	2	01	01	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan	250						50	0	0%
3	30	05	2	01	02	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional	Jumlah promosi produk unggulan skala nasional dan regional yang difasilitasi	10						2	1	10%
3	30	06				PROGRAM STANDARDIDASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang	7,7%						7,7%	1%	19%
3	30	06	2	01		Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	8300						550	48	1%
3	30	06	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera dan Tera Ulang	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan ditera ulang	8300						550	48	1%
							Jumlah data potensi UTTP	5						1	1	40%
3	30	06	2	01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah peserta sosialisasi Metrologi Legal	200						40	0	0%

3	30	07				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran	30%						30%	29%	97%
3	30	07	2	01		Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Jumlah IKM yang dipromosikan	100						100	50	50%
3	30	07	2	01	01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah even festival kreatif	5						1	0	0%
3	30	07	2	01	02	Sub Kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah even pasar murah mebel sabtu	20						4	1	5%
							Jumlah even festival senja pesisir	40						8	4	10%
3	31					URUSAN PERINDUSTRIAN										
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan IKM berkembang	5%						5%	0%	0%
3	31	02	2	01		Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM berkembang	30%						30%	0%	0%
3	31	02	2	01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5						1	0	0%
3	31	02	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi	40						8	0	0%

3	31	02	2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Peserta Pelatihan Digitalisasi IKM	200					40	40	20%
							Jumlah Peserta Pelatihan Macrame	200					40	40	20%
							Jumlah feasibility study pembentukan kawasan industri hasil tembakau	5					1	0	0%
3	31	02	2	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelayanan UPTD Logam yang Diselenggarakan	2250					450	133	6%
3	31	02	2	01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Sampel Garam Yang Diuji	1500					300	150	10%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk penyusunan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan yang disajikan dalam tabel 2.2

Pada tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa pada indikator tujuan dan indikator sasaran yang capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PDRB Kategori Perindustrian

PDRB kategori perindustrian dengan indikator persentase pertumbuhan PDRB kategori perindustrian dan mempunyai indikator sasaran yaitu meningkatnya pertumbuhan jumlah IKM, Pada tahun 2021 mempunyai target anggaran senilai Rp.960.638.114,- dan terealisasi sebesar Rp.842.135.099,- atau tingkat ketercapaiannya 87,66%, dengan target indikator kinerja sebesar 0,5%, terealisasi 0,7% atau tercapai 140%. Persentase peningkatan IKM berkebang melebihi target yang telah ditetapkan karena didasarkan adanya data peningkatan skill atau kemampuan SDM pengrajin, peningkatan kualitas mutu produk, sertifikasi kompetensi, produktivitas dan diversifikasi produk yang dihasilkan

dengan kegiatan pelatihan pengembangan produk mebel, logam dan manajemen IKM.

2. PDRB Kategori Perdagangan

PDRB kategori perdagangan dengan sasaran meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan dua indikator sasaran. Tahun 2021, dari target anggaran Rp.18.169.407.223 terealisasi Rp.16.100.295359 dengan tingkat serapan 88,61%. Untuk target indikator sasaran Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan sebesar 1%, terealisasi 1% atau tercapai 100%, dan target indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Pasar sebesar 79,9 dan terealisasi 81,5 atau tercapai 102%. Tingkat keberhasilan yang tercapai menunjukkan hasil yang positif secara umum, kinerja beserta program, kegiatan, sub kegiatan pendukungnya menunjukkan prospek positif serta realisasi penyelenggaraan urusan perdagangan, khususnya pada UPTD Kemetrolgian didukung oleh pelaksanaan program peningkatan sarana distribusi perdagangan pada tahun 2021 dengan realisasi tingkat serapan 101,2%.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perubahan Renja 2022
Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian pada PDRB		Indikator Urusan	28,11%	5,54%	5,76%	5,99%			5,76%	5,99%	
2	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB		Indikator Urusan	21,19%	5,07%	5,29%	5,52%			5,29%	5,52%	
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perindustrian		Indikator Tujuan		0,265%	0,266%	0,267%			0,266%	0,267%	
4	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan		Indikator Tujuan		0,256%	0,257%	0,258%			0,257%	0,258%	
5	Persentase Pertumbuhan IKM		Indikator Sasaran	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,7%		0,5%	0,5%	
6	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan		Indikator Sasaran	1%	1%	1%	1%	1%		1%	1%	
7	IKM Layanan Pasar		Indikator Sasaran	79,9	80	80,5	81	81,5		80,5	81	
8	Tingkat Inflasi Barang Kebutuhan Pokok		Indikator Sasaran		12	12	12			12	12	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis pada hakikatnya merupakan masalah yang harus diprioritaskan untuk ditangani oleh pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan urgensi, relevansi penanganan, kedudukan dan kemampuan daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program-program pembangunan. Dari analisis lingkungan internal maupun eksternal dapat dirumuskan isu strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan lima tahun dalam kaitannya dengan fokus misi dan agenda, antara lain:

1. Penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB
2. Harga bahan pokok yang fluktuatif
3. Lemahnya sarana prasarana perdagangan

Penjelasan isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Isu Industri

1. Kurangnya sarana prasarana untuk kebutuhan industri logam, seperti mesin dan sarana promosi produk logam;
2. Ketersediaan tenaga terampil yang masih kurang untuk industri kecil menengah (IKM) komoditi kerajinan (regenerasi yang minim);
3. Keterbatasan anggaran/biaya untuk kepengurusan legalitas bahan baku kayu bagi IKM mebel berupa pelayanan dan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK);
4. Pengembangan usaha yang terkendala modal bagi IKM makanan dan minuman; dan
5. Industri kreatif yang terkendala pengembangan produk berupa media promosi yang masih kurang.

2.3.2 Isu Perdagangan

1. Adanya masa transisi dari pandemi menuju endemi yang menyebabkan pelaku usaha berusaha untuk meningkatkan penjualannya;

2. Kurangnya pengusaha yang memahami regulasi tentang cara ekspor yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaku usaha dan perkembangan perusahaan dalam mempromosikan produk ekspor;
3. Belum maksimalnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan system kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informatika;
4. Pengembangan/Revitalisasi kawasan perdagangan dan jasa (pengembangan pasar);
5. Belum adanya regulasi tentang perusahaan berkategori ekspor-import untuk melaporkan datanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
6. Masih banyaknya pengusaha UKM yang belum memanfaatkan potensi pemasaran antar daerah/antar pulau melalui fasilitas pasar lelang komoditi, hal ini sangat berpengaruh pada sistem promosi dan distribusi lokal Kota Pasuruan;
7. Kurang adanya kesadaran dari para pedagang pasar atau diluar lingkungan pasar terhadap peneraan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan perlengkapannya, sehingga untuk menciptakan pasar tertib ukur masih jauh dari harapan dan banyak konsumen yang dirugikan; dan
8. Kurangnya keinginan untuk memanfaatkan fasilitas pendaftaran online pelayanan tera-tera ulang oleh pemilik alat-alat UTTP terutama di tingkat perusahaan.

2.3.3 Isu Pengelolaan Pasar

1. Data PKL di Kota Pasuruan sudah lama sehingga perlu adanya pendataan ulang terhadap PKL;
2. Peraturan yang mengatur tentang Penataan PKL sudah terlalu lama sehingga perlu dikaji ulang;

3. Masih banyak PKL yang melanggar lokus (Lokasi Khusus) yang sudah ditetapkan di Perwali sehingga perlu adanya Pembinaan/Sosialisasi berkelanjutan terhadap para PKL tentang Regulasi/Peraturan yang berkaitan dengan PKL;
4. Masih banyak sarana prasarana pasar yang kurang layak sehingga perlu adanya pemeliharaan/pembaruan terhadap sarana prasarana yang ada di Pasar Rakyat;
5. Penataan pasar rakyat yang kurang bagus dan tidak nyaman bagi konsumen sehingga perlu adanya rehabilitasi/revitalisasi baik fisik maupun non fisik pasar; dan
6. Banyak bedak/kios di pasar yang tidak digunakan oleh pemilik hak pakai, terutama pada bedak/kios yang berada di lantai dua pasar.

Dari uraian isu di atas, tentunya akan mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung misi ke-1 dan misi ke-3. Program Prioritas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung misi ke-1 adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dipengaruhi oleh tinggi rendahnya produktivitas dan daya saing produk industri, dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan pasar. Untuk mencapai keberhasilan misi ke-1 maka perlu dilakukan berbagai jenis sosialisasi dan pelatihan bagi para pelaku IKM, serta melakukan revitalisasi pada pasar dan melakukan pengawasan pengelolaan pasar secara rutin.

Program Prioritas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung misi ke-3 adalah Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang mana saat ini dipengaruhi oleh ketiadaannya sentra produksi kebutuhan bahan pokok. Sebagai tindak lanjut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus melakukan sosialisasi dan monitoring

secara rutin kepada pedagang akan pentingnya informasi harga barang kebutuhan pokok yang mampu menekan inflasi sejak awal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2022

Pada rancangan awal perubahan RKPD tahun 2022 terjadi beberapa perubahan pagu anggaran. Seperti pada urusan bidang perdagangan, beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan mengalami perubahan yang semula Rp.28.984.837.498,- menjadi Rp.35.625.401.733,- perubahan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adanya implementasi P3DN, SPPD, Belanja modal korden, penyesuaian ijazah, rehap kamar mandi dan renovasi ruang rapat, perencanaan teknis dan pengawasan, festival hari perlindungan konsumen, sosialisasi pedagang pasar, belanja barang/jasa rehabilitasi ringan saluran air pasar, pengadaan lampu pagar pasar, pameran logam, mebel, batik, dan mobil hias, dan event Jatim Pride.

Sedangkan pada urusan bidang perindustrian juga mengalami perubahan pagu anggaran yang awalnya Rp.15.753.452.971,- menjadi Rp.15.929.283.771,- perubahan ini terjadi pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri yang sebelumnya tidak dianggarkan untuk pelatihan batik. Selain itu juga terdapat perubahan pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yang awalnya Rp.15.343.194.897,- menjadi Rp.15.442.908.997,- hal ini terjadi dikarenakan terdapat pengecatan dan penggantian atap gedung UPTD Logam sebelah utara.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2022
Kota Pasuruan

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (P-RKPD 2022)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Pilihan				44,676,285,271	Urusan Pemerintahan Pilihan				51,554,685,504	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN			5.29%	28,922,832,300	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN			5.29%	35,625,401,733	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi	98 persen	8,964,583,767	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi	98 persen	9,281,935,136	
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	98 persen	22,047,300	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	98 persen	32,047,300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	17,015,900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	17,015,900	
			Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang disusun	2 Dokumen				Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang disusun	2 Dokumen		

			Jumlah persentase usulan stakholder yang masuk dalam dokumen perencanaan OPD	30 persen				Jumlah persentase usulan stakholder yang masuk dalam dokumen perencanaan OPD	30 persen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	4 Laporan	5,031,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	4 Laporan	5,031,400	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah event yang diikuti	1 event	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	Jumlah event yang diikuti	1 event	10,000,000	
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	98 persen	6,928,523,426	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	98 persen	7,015,944,845	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	68 Orang/bulan	6,836,742,250	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	68 Orang/bulan	6,928,504,357	Gaji dan TPP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	4 Laporan	91,781,176	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	4 Laporan	87,440,488	
	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	98 persen	42,796,900	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	98 persen	35,326,900	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	4 Laporan	42,796,900	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	4 Laporan	35,326,900	
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	98 persen	97,283,000	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	98 persen	155,283,200	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur	1 Kali 95 Orang	97,283,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur Jumlah peserta sosialisasi TKDN	1 Kali 95 Orang 200 Orang	155,283,200	Implementasi P3DN
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	98 persen	248,113,550	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	98 persen	298,109,550	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 Jenis	17,210,750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 Jenis	17,210,750	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Dinas Perindustria	Jumlah bahan bacaan dan	45 Eks/Bulan	4,708,800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Dinas Perindustria	Jumlah bahan bacaan dan	45	4,708,800	

	Perundang-undangan	n dan Perdagangan	peraturan perundang-undangan yang tersedia			Perundang-undangan	n dan Perdagangan	peraturan perundang-undangan yang tersedia	Eks/Bulan		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah air minum isi ulang yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	120 galon 875 orang 180 orang	35,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah air minum isi ulang yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	120 galon 875 orang 180 orang	35,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90 kali	191,194,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90 kali	241,190,000	SPPD
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	98 persen	253,672,500	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	98 persen	292,851,250	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah belanja modal pengadaan komputer Jumlah belanja modal pengadaan korden	5 Unit 10 m	253,672,500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah belanja modal pengadaan alat pendingin Jumlah belanja modal pengadaan komputer	6 unit 8 unit	292,851,250	Belanja Modal Korden dan Kenaikan Harga Printer

								Jumlah belanja modal pengadaan korden	93,9 m		
								Jumlah belanja modal pengadaan printer	5 unit		
								Jumlah belanja modal pengadaan scanner	1 unit		
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98 persen	1,132,542,132	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98 persen	1,137,774,632	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah meterai yang tersedia	260 lembar	1,970,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah meterai yang tersedia	260 lembar	1,970,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan	181,657,832	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan	181,657,832	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	49 jenis	948,914,300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	49 jenis	954,146,800	Penyesuaian Ijazah

		an	Jumlah jenis kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	33 jenis			an	Jumlah jenis kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia	33 jenis		
			Jumlah tenaga pendukung perkantoran yang tersedia	41 orang				Jumlah tenaga pendukung perkantoran yang tersedia	38 orang		
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	98 persen	239,604,959	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	98 persen	314,597,459	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	11 Unit	132,690,899	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	11 Unit	132,690,899	
Jumlah belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4			3 unit	Jumlah belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4				3 unit			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah belanja jasa KIR kendaraan dinas	2 Unit	7,255,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah belanja jasa KIR kendaraan dinas	2 Unit	7,255,000	
Jumlah belanja surat tanda nomor kendaraan bermotor yang tersedia			21 unit	Jumlah belanja surat tanda nomor kendaraan bermotor yang tersedia				21 unit			

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor	4 jenis	40,409,060	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor	4 jenis	40,409,060	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah luasan tanam, halaman, tempat parkir dan pagar yang dipelihara	200 m ²	59,250,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah luasan tanam, halaman, tempat parkir dan pagar yang dipelihara	200 m ²	134,242,500	Rehab Kamar Mandi dan Renovasi Ruang Rapat, Perencanaan Teknis & Pengawasan
	Urusan Perdagangan					Urusan Perdagangan					
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	80 Persen	65,283,900	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	80 Persen	28,718,900	
	Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pedagang/Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen	120 Peserta	65,283,900	Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pedagang/Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen	120 Peserta	28,718,900	
	Sub Kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-	Kota Pasuruan	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen)	75 peserta	65,283,900	Sub Kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-	Kota Pasuruan	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen)	75 peserta	28,718,900	Festival Hari Perlindungan Konsumen

	B2)					B2)					
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustri dan Perdagangan	Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar	100 persen	17,971,726,783	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustri dan Perdagangan	Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar	100 persen	23,058,320,302	
	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustri dan Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi	33.33 persen	7,533,690,883	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustri dan Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi	33.33 persen	12,169,035,522	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat	3 pasar	-	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat	3 pasar	11,169,570,500	Sosialisasi pedagang pasar Kebonagun g, Honorarium Pendampin gan Pembangun an/ Revitalisasi Pasar Rakyat Kebonagun g, Pemelihara an Paving Pasar Dewi Sartika Swakelola, Pemelihara an Pasar Poncol Kios, Pengawasa n Pasar Poncol, Pembangun an Toilet Musholla, Perencanaa

											n Pembangun an Toile Ps Poncol, Pengawasa n Teknis Ps. Gadingrejo, Kajian Amdal Lain Ps. Gadingrejo, Kajian UKL, UPL, Ps. Gadingrejo, Pemelihara an Hydrail Ps. Poncol, Pengawasa n dan Pemelihara an Ps. Poncol dengan Swakelola
					6,611,234,30 0						Awal pengajuan Banprov semula Rp 6.611.234.3 00 , terus disetujui menjadi 10.000.000. 000
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah pasar yang dikelola	6 pasar	922,456,583	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah pasar yang dikelola	6 pasar	999,465,022	Belanja Barang/Jas a Rehabilitasi Ringan Saluran Air/ Talang Pasar

											Karangketug
	Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dinas Perindustri an dan Perdagang an	Persentase PKL yang dibina	5.8 persen	10,438,035,9 00	Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dinas Perindustri an dan Perdagang an	Persentase PKL yang dibina	5.8 persen	10,889,284,780	
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah peserta pembinaan dan penataan PKL	85 orang	7,736,261,80 0	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah peserta pembinaan dan penataan PKL	85 orang	7,736,261,800	
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah petugas pasar	143 orang	2,701,774,10 0	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah petugas pasar	143 orang	3,153,022,980	Pengadaan Lampu Pagar Pasar Karangketug dan Gerobak Sampah
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindustri an dan Perdagang an	Rata - rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok	10 Persen	370,978,800	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindustri an dan Perdagang an	Rata - rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok	10 Persen	370,978,800	
	Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perindustri an dan Perdagang an	Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10 %	20 Persen	370,978,800	Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perindustri an dan Perdagang an	Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10 %	20 Persen	370,978,800	

	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah pemantauan barang bahan pokok dan ketersediaan kebutuhan penting lainnya	264 kali	100,437,000	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah pemantauan barang bahan pokok dan ketersediaan kebutuhan penting lainnya	264 kali	100,437,000	
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Bahan Pokok Murah yang Disediakan	7987 paket	270,541,800	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Bahan Pokok Murah yang Disediakan	7987 paket	270,541,800	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Peningkatan IKM yang Melakukan Ekspor	0,5 Persen	940,762,753	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Peningkatan IKM yang Melakukan Ekspor	0,5 Persen	897,742,753	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase IKM yang Melakukan Ekspor	0.4 Persen	940,762,753	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase IKM yang Melakukan Ekspor	0.4 Persen	897,742,753	
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan	50 peserta	365,687,000	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan	50 peserta	322,667,000	
	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional	Luar Kota	Jumlah promosi produk unggulan skala nasional dan regional	2 event	575,075,753	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional	Luar Kota	Jumlah promosi produk unggulan skala nasional dan regional	2 event	575,075,753	

			yang difasilitasi					yang difasilitasi			
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Presentase alat UTTP yang telah ditera dan Tera ulang	7.7 persen	161,018,897	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Presentase alat UTTP yang telah ditera dan Tera ulang	7.7 persen	164,228,497	
	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	550 unit	161,018,897	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	550 unit	164,228,497	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pasuruan	Jumlah data potensi UTTP	1 dokumen	144,554,397	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pasuruan	Jumlah data potensi UTTP	1 dokumen	147,763,997	Kenaikan harga belanja modal laptop
	Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Pasuruan	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen	40 Orang	16,464,500	Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Pasuruan	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen	40 Orang	16,464,500	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran	30 Persen	448,477,400	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran	30 Persen	1,823,477,345	
	Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah IKM yang dipromosikan	100 IKM	448,477,400	Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah IKM yang dipromosikan	100 IKM	1,823,477,345	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah event festival kreatif	4 Event	84,275,600	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah event festival kreatif	4 Event	1,459,275,545	Pameran LOGAM, MEBEL, BATIK, dan Mobil Hias

											JATIM PRIDE
	Sub Kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah event pasar murah mebel sabtu	4 Event	364,201,800	Sub Kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah event pasar murah mebel sabtu	4 Event	364,201,800	
			Jumlah event festival senja pesisir	8 Event				Jumlah event festival senja pesisir	8 Event		
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN			5.76%	15,753,452,971	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN			5.76%	15,929,283,771	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase peningkatan IKM berkembang	5 %	15,753,452,971	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase peningkatan IKM berkembang	5 %	15,929,283,771	
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Kota	Persentase IKM berkembang	30 persen	15,753,452,971	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Kota	Persentase IKM berkembang	30 persen	15,929,283,771	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri kota pasuruan	1 Dokumen	26,712,300	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri kota pasuruan	1 Dokumen	26,712,300	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Pasuruan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	4 Kegiatan	146,794,974	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Pasuruan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	4 Kegiatan	232,219,274	
			Jumlah feasibility study pembentukan kawasan industri hasil tembakau	1 dokumen				Jumlah feasibility study pembentukan kawasan industri hasil tembakau	1 dokumen		

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pasuruan	Jumlah peserta pelatihan digitalisasi IKM	40 IKM	227,992,100	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pasuruan	Jumlah peserta pelatihan digitalisasi IKM	40 IKM	218,684,500	Pelatihan Pengemban gan IKM Batik
		Jumlah peserta pelatihan macrame	20 IKM				Jumlah peserta pelatihan macrame	20 IKM		
		Jumlah peserta pelatihan batik	20 IKM				Jumlah peserta pelatihan batik	20 IKM		
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah pelayanan UPTD logam yang diselenggarakan	450 Pelayanan	15,343,194,8 97	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah pelayanan UPTD logam yang diselenggarakan	450 Pelayanan	15,442,908,997	Pengecatan dan Penggantian Atap Gedung UPTD Logam sebelah utara Belanja Jasa Konsultasi Perencanaa n Penataan Ruang-Jasa Perencanaa n dan Perancang an Perkotaan (Perencana an Gedung UPTD Logam)
Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Pasuruan	Jumlah sampel garam yang diuji	300 Sampel	8,758,700	Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Pasuruan	Jumlah sampel garam yang diuji	300 Sampel	8,758,700	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Disperindag Kota Pasuruan dilakukan pula forum perangkat daerah yang mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan rencana kerja. Usulan ini dihasilkan dari aspirasi masyarakat melalui proses musrenbang kelurahan dilanjutkan musrenbang kecamatan dan terakhir musrenbangkota. Dengan adanya musrenbang diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat serta menjawab isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya hasil musrenbang kota akan dievaluasi dan disesuaikan dengan program/kegiatan PD yang bersangkutan.

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, ada beberapa usulan dari masyarakat dalam bentuk pelatihan teknik manajemen IKM, fasilitasi kemasan dan sertifikasi halal, pelatihan desain mebel, pelatihan pembuatan makanan olahan, pelatihan 5R untuk IKM logam, dan pelatihan teknik pengelasan. Setelah dilakukan analisis dan sinkronisasi dengan program/kegiatan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan, usulan kegiatan dari masyarakat dijadikan indikator sub kegiatan dalam Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dari Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada tahun 2022 mendukung sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni Meningkatnya Pertumbuhan jumlah IKM, yang nantinya mendukung tujuan PD yakni Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.4 usulan kegiatan dari masyarakat.

Tabel 2.4
Usulan program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Pasuruan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
BIDANG INDUSTRI					
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dalam dan Luar Kota	Persentase peningkatan IKM berkembang	5%	
	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase IKM yang berkembang	30%	
	SubKegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	9 Dokumen	
	1. Pelatihan Teknik Manajemen IKM Kota Pasuruan	Dalam Kota	Jumlah IKM yang dilatih	40 IKM	
	2. Fasilitasi Kemasan dan Sertifikasi Halal	Luar Kota	Jumlah IKM yg difasilitasi	14 IKM	
	3. Pelatihan Desain Mebel	Dalam Kota	Jumlah IKM yg dilatih	14 IKM	
	4. Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan (Tepung)	Dalam Kota	Jumlah IKM yg dilatih	14 IKM	
	5. Pendampingan 5R untuk IKM Logam	Dalam Kota	Jumlah IKM yg didampingi	10 IKM	
6. Pelatihan Teknik Pengelasan	Dalam Kota	Jumlah IKM yg dilatih	10 IKM		

Sumber : Hasil Musrengbangkel (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju 2023

Kota Pasuruan

Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Perubahan Tahun 2022					Tambah/ Kurang	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	
3	Urusan Pemerintahan Pilihan					44,676,285,271	51,554,685,504		3,530,785,690		33,508,410,630	
3	30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN		5.29%	5.29%	28,922,832,300	35,625,401,733	DAU	3,207,665,000		5.29%	31,530,082,521
3	301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Pasuruan, Panggun grejo, Pekuncen	98 persen	98 persen	8,964,583,767	9,281,935,136	DAU	763,424,700		98 persen	9,417,410,867
3	301201	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggun grejo, Pekuncen	98 persen	98 persen	22,047,300	32,047,300	DAU	-		98 persen	25,647,300
3	3012011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan, Panggun grejo, Pekuncen	4 Dokumen	4 Dokumen	17,015,900	17,015,900	DAU	-		4 Dokumen	17,015,900

							Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang disusun		2 Dokumen	2 Dokumen					2 Dokumen	
							Jumlah persentase usulan stakeholder yang masuk dalam dokumen perencanaan OPD		30 persen	30 persen					30 persen	
3	30	01	20	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	4 Laporan	4 Laporan	5,031,400	5,031,400	DAU	-	4 Laporan	8,631,400
3	30	01	20	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event yang diikuti	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	1 event	1 event	-	10,000,000	DAU			
3	30	01	20	02		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	98 persen	98 persen	6,928,523,426	7,015,944,845	DAU	505,000,000	98 persen	6,948,440,426
3	30	01	20	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	6,836,742,250	6,928,504,357	DAU	505,000,000	68 Orang/bulan	6,856,659,250
3	30	01	20	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 Laporan	4 Laporan	91,781,176	87,440,488	DAU	-	4 Laporan	91,781,176

3	3	0	2	0		Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	98 persen	98 persen	42,796,900	35,326,900	DAU	-		98 persen	42,796,900	
3	3	0	2	0	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 Laporan	4 Laporan	42,796,900	35,326,900	DAU	-		4 Laporan	42,796,900	
3	3	0	2	0		Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	98 persen	98 persen	97,283,000	155,283,200	DAU	78,000,200		98 persen	97,283,000	
3	3	0	2	0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Kali	1 Kali	97,283,000	155,283,200	DAU	78,000,200	PAK	1 Kali	97,283,000	
							Jumlah peserta pembinaan rohani aparatur			95 Orang	95 Orang						95 Orang	
							Jumlah peserta sosialisasi TKDN				200 Orang							
3	3	0	2	0		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	98 persen	98 persen	248,113,550	298,109,550	DAU	50,000,000		98 persen	248,113,550	
3	3	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11 Jenis	11 Jenis	17,210,750	17,210,750	DAU	-		11 Jenis	17,210,750	

							tersedia												
3	3	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45 Eks/Bulan	45 Eks/Bulan	4,708,800	4,708,800	DAU	-		45 Eks/Bulan	4,708,800		
3	3	0	2	0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah air minum isi ulang yang tersedia	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	120 galon	120 galon	35,000,000	35,000,000	DAU	-		120 galon	35,000,000		
							Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia		875 orang	875 orang						875 orang			
							Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia		180 orang	180 orang						180 orang			
3	3	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	90 kali	90 kali	191,194,000	241,190,000	DAU	50,000,000		90 kali	191,194,000		
3	3	0	2	0		Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	98 persen	98 persen	253,672,500	292,851,250	DAU	52,424,500		98 persen	567,232,600		
3	3	0	2	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah belanja modal pengadaan alat pendingin	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5 Unit	6 unit	253,672,500	292,851,250	DAU	52,424,500	PAK	7 Unit	567,232,600		

3	3	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49 jenis	49 jenis	948,914,300	954,146,800	DAU	3,000,000	PAK	49 jenis	948,914,300						
							Jumlah jenis kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia		33 jenis	33 jenis												33 jenis	
							Jumlah tenaga pendukung perkantoran yang tersedia		41 orang	38 orang												41 orang	
3	3	0	2	0		Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	98 persen	98 persen	239,604,959	314,597,459	DAU	75,000,000		98 persen	355,354,959						
3	3	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11 Unit	11 Unit	132,690,899	132,690,899	DAU	-		11 Unit	132,690,899						
							Jumlah belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		3 unit	3 unit													3 unit
3	3	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah belanja jasa KIR kendaraan dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 Unit	2 Unit	7,255,000	7,255,000	DAU	-		2 Unit	7,255,000						
							Jumlah belanja surat tanda nomor kendaraan		21 Unit	21 Unit													21 Unit

							bermotor yang tersedia												
3	3	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 jenis	4 jenis	40,409,060	40,409,060	DAU	-		4 jenis	40,409,060		
3	3	0	2	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luasan tanam, halaman, tempat parkir dan pagar yang dipelihara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200 m ²	200 m ²	59,250,000	134,242,500	DAU	75,000,000	PAK	200 m ²	175,000,000		
3	3	0				Urusan Perdagangan													
3	3	0	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80 Perse	80 Perse	65,283,900	28,718,900	DAU	-		80 Perse	119,317,400		
3	3	0	2	0		Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pedagang/Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	120 Peserta	120 Peserta	65,283,900	28,718,900	DAU	-		120 Peserta	119,317,400		
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen)	Kota Pasuruan	75 peserta	75 peserta	65,283,900	28,718,900	DAU	-		75 peserta	119,317,400		
3	3	0	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100 persen	100 persen	17,971,726,783	23,058,320,302	DAU	1,139,240,300		100 persen	18,602,430,883		

3	3	0	2	0		Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	33.33 persen	33.33 persen	7,533,690,883	12,169,035,522	DAU	877,990,300	33.33 persen	7,922,456,583	
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat	Kota Pasuruan	3 pasar	3 pasar	-	11,169,570,500	DAU	800,980,000	PAK	3 pasar	7,000,000,000
											6,611,234,300		BANP ROV				
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola	Kota Pasuruan	6 pasar	6 pasar	922,456,583	999,465,022	DAU	77,010,300	PAK	6 pasar	922,456,583
3	3	0	2	0		Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase PKL yang dibina	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.8 persen	5.8 persen	10,438,035,900	10,889,284,780	DAU	261,250,000		5.8 persen	10,679,974,300
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta pembinaan dan penataan PKL	Kota Pasuruan	85 orang	85 orang	7,736,261,800	7,736,261,800	DAU	-		85 orang	7,974,974,300
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah petugas pasar	Kota Pasuruan	143 orang	143 orang	2,701,774,100	3,153,022,980	DAU	261,250,000	PAK	143 orang	2,705,000,000
3	3	0				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata - rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10 Perse n	10 Perse n	370,978,800	370,978,800	DAU	-		10 Perse n	524,519,210

3	3	0	2	0		Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20 Perse n	20 Perse n	370,978,800	370,978,800	DAU	-	20 Perse n	524,519,210
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan barang bahan pokok dan ketersediaan kebutuhan penting lainnya	Kota Pasuruan	264 kali	264 kali	100,437,000	100,437,000	DAU	-	264 kali	249,519,610
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Pokok Murah yang Disediakan	Kota Pasuruan	7987 paket	7987 paket	270,541,800	270,541,800	DAU	-	7987 paket	274,999,600
3	3	0				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan IKM yang Melakukan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,5 Perse n	0,5 Perse n	940,762,753	897,742,753	DAU	-	0,5 Perse n	1,949,324,983
3	3	0	2	0		Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Melakukan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0.4 Perse n	0.4 Perse n	940,762,753	897,742,753	DAU	-	0.4 Perse n	1,949,324,983
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan	Kota Pasuruan	50 peserta	50 peserta	365,687,000	322,667,000	DAU	-	50 peserta	149,995,300
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Nasional	Jumlah promosi produk unggulan skala nasional dan regional yang difasilitasi	Luar Kota	2 event	2 event	575,075,753	575,075,753	DAU	-	2 event	1,799,329,683

3	3	0				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase alat UTTP yang telah ditera dan Tera ulang	Dinas Perindust rian dan Perdagangan	7.7 perse n	7.7 perse n	161,018,89 7	164,228,497	DAU	5,000,000		7.7 perse n	252,892,678
3	3	0	2	0		Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	Dinas Perindust rian dan Perdagangan	550 unit	550 unit	161,018,89 7	164,228,497	DAU	5,000,000		550 unit	252,892,678
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah data potensi UTTP	Kota Pasuruan	1 dokumen	1 dokumen	144,554,39 7	147,763,997	DAU	5,000,000	PAK	1 dokumen	224,441,078
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen	Kota Pasuruan	40 Orang	40 Orang	16,464,500	16,464,500	DAU	-		40 Orang	28,451,600
3	3	0				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran	Dinas Perindust rian dan Perdagangan	30 Perse n	30 Perse n	448,477,40 0	1,823,477,345	DAU	1,300,000, 000		30 Perse n	664,186,500
3	3	0	2	0		Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Jumlah IKM yang dipromosikan	Dinas Perindust rian dan Perdagangan	100 IKM	100 IKM	448,477,40 0	1,823,477,345	DAU	1,300,000, 000		100 IKM	664,186,500
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah event festival kreatif	Kota Pasuruan	4 Event	4 Event	84,275,600	1,459,275,545	DAU	-	PAK	4 Event	664,186,500
													DAU	1,300,000, 000	PAK		
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	Jumlah event pasar murah mebel sabtu	Kota Pasuruan	4 Event	4 Event	364,201,80 0	364,201,800	DAU	-			

						Kabupaten/Kota	Jumlah event festival senja pesisir		8 Event	8 Event							
3	3					URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN			5.76%	5.76%	15,753,452,971	15,929,283,771	DAU	323,120,690		5.76%	1,978,328,109
3	3	0				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan IKM berkembang		5 %	5 %	15,753,452,971	15,929,283,771	DAU	323,120,690		5 %	1,978,328,109
3	3	0	2	0		Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM berkembang	Dalam dan Luar Kota	30 persen	30 persen	15,753,452,971	15,929,283,771	DAU	323,120,690		30 persen	1,978,328,109
3	3	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri kota pasuruan		1 Dokumen	1 Dokumen	26,712,300	26,712,300	DAU	-			
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	Kota Pasuruan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	146,794,974	232,219,274	DAU	-		4 Kegiatan	316,640,000
							Jumlah feasibility study pembentukan kawasan industri hasil tembakau		1 dokumen	1 dokumen							
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peserta pelatihan digitalisasi IKM	Kota Pasuruan Kota Pasuruan	40 IKM	40 IKM	227,992,100	218,684,500	DAU	-		40 IKM	851,284,100
							Jumlah peserta pelatihan macrame		20 IKM	20 IKM						20 IKM	

							Jumlah peserta pelatihan batik		20 IKM	20 IKM			DAU	98,410,000	PAK	20 IKM	
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelayanan UPTD logam yang diselenggarakan	Kota Pasuruan	450 Pelayanan	450 Pelayanan	15,343,194,897	15,442,908,997	DAU	224,710,690	PAK	450 Pelayanan	801,533,509
3	3	0	2	0	0	Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah sampel garam yang diuji	Kota Pasuruan	300 Sampel	300 Sampel	8,758,700	8,758,700	DAU	-		300 Sampel	8,870,500

BAB IV

PENUTUP

Indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan akan sangat bergantung pada komitmen dan peran serta aktif melalui profesionalisme aparatur pemerintahan, umpan balik pembangunan dari masyarakat, dan yang terakhir adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022 merupakan rencana tahunan yang di dalamnya memuat kebijakan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ditetapkan untuk memberi arah dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Pasuruan maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Selain itu, juga sebagai pedoman pelaksanaan event “Pasuruan Menuju MTQ Ke-30” Jawa Timur tahun 2023.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021 - 2026 dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 2021 - 2026 dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya koordinasi yang mantap dan sinergi antar bidang dan sub bidang, baik dalam lingkup internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri, maupun dengan lembaga perangkat daerah lain dalam upaya menekan sekecil mungkin hambatan dan kendala yang terjadi yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

Pasuruan, 25 Juli 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN



Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP :19651231 198602 1 041

